

# IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGGULANGAN ANAK JALANAN DALAM RANGKA PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG MANDIRI DI KOTA SERANG

Rizal Rasidin  
NPP. 29.0747

*Asdaf Kota Serang, Provinsi Banten  
Program Studi Kebijakan Publik*

*Email: rizalrassyid@gmail.com*

## ABSTRACT

**Problem Statement/Background (GAP):** The Social Service as the executor of the Serang City Regional Regulation No. 2 of 2010 and the regional apparatus that has a function to help run the wheels of government in the social sector have the responsibility to deal with street children, especially to rehabilitate and provide guidance to street children. **Purpose:** This study was to find out how the implementation of the policy of controlling street children at the Social Service of Serang City, the inhibiting factors in implementing the policy of controlling street children at the Social Service of Serang City, as well as the government's efforts to overcome the inhibiting factors in the implementation of the policy of controlling street children at the Social Service of Serang City. In this study, the author uses a qualitative descriptive method. **Method:** This study describes aspects related to the observed and studied focus. Researchers used Observation, Interview, and Documentation to collect data. The data obtained were then analyzed through Data Reduction, Data Display, and Conclusion Drawing/Verification. **Result:** This study are that the implatation of the policy of dealing with street children in the city of serang has been going well, its just that it is still constrained by limeted budget and facility resources. **Conclusion:** Based on the research that has been carried out, the author found that in the implementation of the policy of dealing with street children at the Serang City Social Service, there were still some shortcomings, such as the lack of a budget, the limited number of human resources in the Serang City Social Service environment to deal with the problem. street children and other community diseases, the lack of facilities to handle street children, and the lack of incentives from the Serang City Social Service to social workers in the field.

**Keywords:** Implementation, Empowermant, Regional Regulation of the CitY SerangNumber2 of 2010, Street Children

## ABSTRAK

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** Dinas Sosial selaku pelaksana Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2010 dan perangkat daerah yang memiliki fungsi untuk membantu menjalankan roda pemerintahan di bidang sosial memiliki tanggung jawab untuk menangani anak jalanan, terutama untuk merehabilitasi dan memberikan pembinaan kepada anak jalanan. **Tujuan:** Penelitian ini untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan penggulungan anak jalanan di Dinas Sosial Kota Serang, faktor penghambat dalam implementasi kebijakan penggulungan anak jalanan di Dinas Sosial Kota Serang, serta upaya pemerintah dalam mengatasi faktor penghambat dalam implementasi kebijakan penanggulangan anak jalanan di Dinas Sosial Kota Serang. Dalam penelitian kali ini Penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif. **Metode:** Metode penelitian ini menggambarkan aspek-aspek yang berkaitan dengan fokus yang diamati dan dikaji. Peneliti menggunakan Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi untuk mengumpulkan data. Data yang didapat selanjutnya dianalisis melalui *Data Reduction, Data Display, dan Conclusion Drawing/Verification*. **Hasil/Temuan:** Temuan yang diperoleh dalam penelitian ini adalah implementasi kebijakan penanggulangan anak jalanan di Kota Serang sudah berjalan dengan baik, hanya saja masih terdapat kendala pada anggaran dan sumber daya fasilitas yang terbatas. **Kesimpulan:** Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, Penulis menemukan bahwa dalam Implementasi kebijakan penanggulangan anak jalanan di Dinas Sosial Kota Serang telah terlaksana dengan baik namun masih didapati beberapa kekurangan seperti minimnya anggaran yang dimiliki, terbatasnya jumlah sumber daya manusia yang ada di lingkungan Dinas Sosial Kota Serang untuk menangani anak jalanan dan penyakit masyarakat lainnya, minimnya fasilitas untuk menangani anak jalanan, dan kurangnya pemberian insentif dari Dinas Sosial Kota Serang kepada pekerja sosial di lapangan. **Kata Kunci:** Implementasi, Pemberdayaan, Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2010, Anak Jalanan.

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara dengan populasi kepadatan penduduk terbesar ke empat di dunia dari sensus terakhir jumlah penduduk Indonesia berjumlah 269 juta jiwa penduduk. Hal ini lah menyebabkan berbagai permasalahan muncul baik di bidang ekonomi, budaya dan sosial. Masalah-masalah yang muncul tentu tidak mudah untuk diatasi dengan waktu yang singkat, butuh waktu dan proses yang panjang untuk mengatasi permasalahan tersebut teratasi sepenuhnya.

Permasalahan yang sekarang sedang marak adalah menjamurnya anak jalanan di berbagai kota di Indonesia. Masalah sosial seperti anak jalanan seperti tidak ada habisnya, mati satu lalu tumbuh seribu begitu lah ungkapan yang cocok untuk permasalahan anak jalanan. Menjamurnya anak jalanan dipengaruhi oleh banyaknya angka keluarga miskin di Indonesia sehingga orangtua menghalalkan berbagai cara untuk memenuhi kebutuhan hidupnya salah satunya adalah dengan cara mengerahkan anak-anaknya yang masih kecil yang masih duduk di bangku sekolah bahkan ada yang masih balita untuk turun kejalan untuk mengemis, mengamen, dan memelas belas kasihan di lampu merah, pusat perkotaan dan pusat keramaian. Ini lah faktor yang menjadikan anak jalanan semakin menjamur di kota-kota di Indonesia dan merupakan persoalan sosial yang kompleks yang dihadapi oleh bangsa Indonesia dan sudah seharusnya menjadi perhatian penting oleh pemerintah untuk segera di atasi secara tuntas.



## 1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil

Adanya aduan mengenai banyaknya anak jalanan yang meresahkan masyarakat yang mengganggu keamanan dan keselamatan di jalan, mengganggu kenyamanan dan ketertiban umum, pemerintah melalui Dinas Sosial Kota Serang selaku pelaksana kebijakan memberikan perhatian penuh dalam menangani penanggulangan anak jalanan dalam upaya meningkatkan pemberdayaan sumber daya manusia yang mandiri dan kesejahteraan sosial di Kota Serang.

Pemerintah Kota Serang melalui Dinas Sosial telah melakukan banyak upaya dalam penanggulangan persoalan anak jalanan di Kota Serang seperti melakukan pencegahan, pembinaan dan rehabilitasi dan penindakan terhadap anak jalanan. Dinas Sosial Kota Serang juga selalu berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) untuk melakukan operasi penertiban untuk menjaring anak jalanan disekitar Kota Serang. Pemerintah juga terus mengkampanyekan kepada masyarakat agar tidak memberikan uang kepada anak jalanan.

Upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Serang selaku pelaksana kebijakan mengenai penanggulangan persoalan sosial anak jalanan sampai saat ini belum bisa terselesaikan karena melihat kondisi dilapangan sekarang masih banyak anak jalanan yang berkeliaran. Terlepas itu juga anak jalanan yang terjaring penertiban oleh Dinas Sosial dan Polisi Satuan Pamong Praja (Satpol-PP) hanya

dilakukan pendataan dan selanjutnya dikembalikan kepada keluarga, karena Dinas Sosial Kota Serang tidak memiliki panti rehabilitasi untuk pemberdayaan anak jalanan.

Berdasarkan permasalahan tersebut, untuk mengetahui bagaimana penanggulangan anak jalanan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Serang dalam upaya pemberdayaan sumber daya manusia yang mandiri maka penulis tertarik mengambil judul "**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGGULANGAN ANAK JALANAN DALAM RANGKA PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG MANDIRI DI KOTA SERANG**"

### **1.3 Penelitian Terdahulu**

Penelitian yang pertama yaitu, Studi Anak Jalanan (tinjauan peraturan daerah nomor 2 tahun 2008 tentang pembinaan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis di Kota Makassar). (Sakman, 2016). Tujuan penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran dan penjelasan mengenai karakteristik anak jalanan, pelaksanaan Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2018 dan strategi pemerintah dalam mengatasi hambatan-hambatan dalam melakukan pembinaan anak jalanan. Lokasi penelitian berada di Kota Makassar, fokus penelitian ini adalah implementasi perda dalam penanganan anak jalanan di Kota Makassar, metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif, teori yang digunakan adalah implementasi oleh Van Meter dan Horn, adapun hasil

yang diperoleh dalam penelitian ini adalah Implementasi perda dalam pembinaan anak jalanan belum berjalan secara optimal.

Analisis kebijakan pendidikan untuk anak jalanan di Kota Yogyakarta (Syahrul dan Amika Wardana, 2017). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kebijakan pendidikan untuk anak jalanan, implemetasi kebijakan pendidikan untuk anak jalanan dan dampak kebijakan pendidikan pada anak jalanan di Kota Yogyakarta. Lokasi penelitian ini berada di Kota Yogyakarta, fokus penelitian ini adalah kebijakan pendidikan untuk menangani anak jalanan , metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif, teori yang digunakan adalah Implementasi oleh Craswell, hasil yang diperoleh dalam penelitian ini bahwa layanan pendidikan formal dan informal khusus anak jalanan sudah tidak relevan dengan kondisi kehidupan saat ini.

Peran keluarga dalam pembinaan anak jalanan di jalan Sultan Alauddin Makassar (Nurhadi Shadiqqin,2018). Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui problematika anak jalanan dalam keluarga dan lingkungannya dan untuk mengetahui peran keluarga dalam pembinaan kepada anak. Lokasi penelitian ini berada di Kota Makassar, fokus penelitian ini adalah peran keluarga dalam pembinaan anak jalanan, metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif, teori yang digunakan adalah peran keluarga, hasil yang diperoleh dalam penelitian ini Peran keluarga dalam pembinaan pendidikan anak jalanan



di kawasan jalan Sultan Alauddin tidak berjalan dengan baik sebagaimana mestinya.

Penanganan anak jalanan berbasis *Community Development* di Kota Serang (Budi Hasanah dan Liza Diniarizky Putri, 2019). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengupas penanggulangan anak jalanan berbasis *Community Development* dengan tema konflik dan model intervensi. Lokasi penelitian ini berada di Kota Serang, fokus penelitian ini adalah penanganan anak jalanan berbasis *Community Development*, metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, teori yang digunakan adalah teori Biddle, hasil yang diperoleh dalam penelitian ini Program berbasis *community development* belum berjalan secara efektif.

- Fenomena anak jalanan di Kota Cirebon, (Suryadi, dkk. 2020). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengungkap permasalahan sosial, ekonomi dan budaya anak jalanan di Kota Cirebon. Lokasi penelitian ini berada di Kota Cirebon, fokus penelitian ini adalah mengenai fenomena kehidupan anak jalanan, metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif, teori yang digunakan adalah *Household Survival Strategy*, hasil yang diperoleh dalam penelitian ini bahwa aktor ekonomi dan psikologis menjadi alasan anak jalanan menjadi anak jalanan, banyak yang putus sekolah dan sebagian anak jalanan mendapat kekerasan fisik.

#### **1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Dari hasil pemetaan terhadap penelitian terdahulu, selanjutnya dapat dikomparasi antara persamaan serta perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti.

Adapun perbedaan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu peneliti akan melakukan penelitian di Kota Serang, teori yang akan digunakan yaitu teori implementasi oleh Edward III dan teori pemberdayaan oleh Mardikanto, adapun fokus penelitian yang akan dilakukan yaitu bagaimana implementasi kebijakan penanggulangan anak jalanan berikut apa saja faktor yang menjadi penghambat dan upaya dalam mengatasi faktor penghambat tersebut yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Serang.

#### **1.5 Tujuan**

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan penanggulangan anak jalanan oleh Dinas Sosial Kota Serang dalam rangka pemberdayaan sumber daya manusia yang mandiri di Kota Serang.
2. Untuk mengetahui apa saja faktor penghambat implementasi kebijakan penanggulangan anak jalanan dalam rangka pemberdayaan sumber daya manusia yang mandiri di Kota Serang.



3. Untuk mengetahui apa saja upaya mengatasi faktor penghambat dalam upaya implementasi kebijakan tersebut.

## **II. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Dengan menggunakan metode ini penulis akan menggambarkan dan menganalisis masalah-masalah yang sebenarnya terjadi secara berurutan atau sistematis sehingga dapat diinterpretasikan secara tepat untuk mendapatkan gambaran tentang permasalahan secara luas dan mendalam serta hubungan dari fenomena yang terjadi agar dapat diambil kesimpulan untuk pemecahan masalah yang ada.

Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diambil dengan melakukan wawancara dengan narasumber, data sekunder diambil melalui dokumentasi lapangan dan artikel lainnya. Adapun teknik dalam melakukan wawancara peneliti menggunakan teknik wawancara semi terstruktur. Adapun dalam menentukan informan, peneliti menggunakan metode purposive sampling dengan teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan dokumentasi.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Fakta-fakta yang penulis peroleh dari penelitian dilapangan diperoleh melalui wawancara, dokumentasi dan observasi secara langsung dilapangan. Dalam menganalisis penelitian ini dari perspektif teoritis, penulis menggunakan konsep Implementasi milik George Edward III untuk menganalisis bagaimana Implementasi Kebijakan Penanggulangan Anak Jalanan Dalam Rangka Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Yang Mandiri di Kota Serang yang berpedoman pada Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2010 oleh Dinas Sosial dalam menangani anak jalanan.

Konsep Implementasi Edward III memiliki 4 (empat) variabel dan masing-masing variabel memiliki indikator-indikator yang terdiri dari:

1. Komunikasi
  - a. Transmisi
  - b. Kejelasan
  - c. Konsistensi
2. Sumber Daya
  - a. Staff
  - b. Wewenang
  - c. Informasi
  - d. Fasilitas-fasilitas
3. Disposisi
  - a. Pengangkatan Birokrasi
  - b. Insentif
4. Struktur Birokrasi
  - a. *Standard Operating System*
  - b. Fragmentasi

### **3.1 Implementasi Kebijakan Penanggulangan Anak Jalanan Oleh Dinas Sosial Kota Serang**

#### **1. Komunikasi**

Komunikasi merupakan salah satu variabel yang ada dalam teori implementasi menurut Edward III. Komunikasi dapat berjalan dengan baik apabila indikator-indikator yang ada dalam variabel komunikasi seperti transmisi, kejelasan, dan konsistensi berjalan dengan baik. Sesuai dengan teori Edward III, dapat disimpulkan bahwa proses komunikasi di Dinas Sosial Kota Serang terkait implementasi kebijakan penanggulangan anak jalanan yang mengacu pada Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2010 telah memenuhi tiga indikator yakni transmisi, kejelasan, dan konsistensi sehingga komunikasi yang dilakukan oleh pembuat kebijakan publik dapat tersalurkan kepada pelaksana kebijakan dan penerima kebijakan.

#### **2. Sumber Daya**

Dari data yang diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi oleh peneliti bahwa implementasi kebijakan penanggulangan anak jalanan oleh Dinas Sosial pada Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2010 di Dinas Sosial Kota Serang dilihat dari variabel Sumber Daya masih dibidang kurang. Karena dari 4 (empat) indikator yang dimiliki hanya 2 (dua) indikator yang terbilang baik, yakni Sumber Daya Wewenang dan Sumber Daya Informasi. Sedangkan 2 (dua) indikator lainnya yaitu Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya



Fasilitas masih kurang baik, sehingga mampu menghambat proses implementasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Serang.

### **3. Disposisi**

Hasil analisis yang peneliti lakukan terhadap variabel Disposisi di Dinas Sosial Kota Serang dalam implementasi kebijakan penanggulangan anak jalanan pada Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 untuk menangani anak jalanan masih mengalami hambatan. Untuk indikator pengangkatan birokrasi Dinas Sosial Kota Serang sudah bagus karena sudah menempatkan pegawainya pada posisi yang sesuai dengan kompetensinya. Sedangkan untuk indikator pemberian insentif terdapat hambatan dimana pemberian insentif pada pekerja sosial yang turun langsung kelapangan tidak sebanding dengan beban kerja yang mereka terima dilapangan. Rumitnya menangani anak jalanan ditambah insentif yang diberikan tidak sebanding membuat pekerja sosial yang turun kelapangan menjadi tidak maksimal dalam melaksanakan tugasnya. Hal ini dapat menghambat proses implementasi kebijakan publik untuk menangani anak jalanan di Kota Serang.

### **4. Struktur Birokrasi**

Struktur birokrasi memiliki pengaruh yang sangat penting dalam keberhasilan implementasi suatu kebijakan publik. Kebijakan publik tidak akan terlaksana dengan baik apabila struktur birokrasi yang dimiliki lemah walaupun sumber daya yang dimiliki memadai. Variabel Struktur Birokrasi pada proses implementasi kebijakan penanggulangan anak

jalanan yang mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 untuk menangani anak jalan tidak memiliki hambatan sedikitpun pada setiap indikatornya. Ini menandakan bahwa struktur birokrasi yang ada pada Dinas Sosial sangat baik sehingga mendukung keberhasilan pelaksanaan kebijakan publik untuk mengatasi anak jalanan di Kota Serang.

### **3.2 Pemberdayaan Anak Jalanan Oleh Dinas Sosial Kota Serang**

Upaya yang dilakukan Dinas Sosial Kota Serang untuk memberdayakan anak jalanan agar bisa mandiri dan tidak turun kembali ke jalanan melalui program-program yang dicanangkan berkaitan dengan fokus penelitian dan latar belakang masalah yang ditulis oleh penulis, maka kajian teoretis yang digunakan adalah bina manusia, bina usaha, bina lingkungan dan bina kelembagaan dalam Mardikanto dan Soebiato (2017:114) yang merupakan indikator penting keberhasilan dalam pemberdayaan anak jalanan.

#### **1. Bina Manusia**

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan beberapa informan, dapat disimpulkan bahwa Dinas Sosial Kota Serang telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan wewenang yang diberikan. Hal ini dapat dilihat dari upaya-upaya yang dilakukan dalam menangani permasalahan anak jalanan di Kota Serang. Dinas Sosial Kota Serang memberikan pembinaan dan rehabilitasi kepada anak jalanan yang

tertangkap oleh SATPOL PP Kota Serang pada saat razia, pembinaan dilakukan guna membentuk mental anak jalanan agar menyadari bahwa menjadi anak jalanan merupakan sesuatu yang salah sehingga mereka tidak memiliki keinginan untuk kembali turun kejalanan.

## **2. Bina Usaha**

Bina usaha adalah salah satu dimensi dari upaya pemberdayaan masyarakat yang memiliki peranan penting. Dalam dimensi ini terdapat 3 indikator, keterampilan, pelatihan dan Modal.

Berdasarkan data yang diperoleh oleh peneliti, ditemukan bahwa dalam variabel ini sudah berjalan dengan baik hanya saja terdapat kendala atau hambatan yaitu kurangnya anggaran yang dimiliki, fasilitas dan tempat dan susahnya merubah mental anak jalanan itu sendiri sehingga dapat menghambat keberhasilan proses implementasi kebijakan penanggulangan anak jalanan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Serang.

## **3. Bina Lingkungan**

Dimensi ketiga adalah bina lingkungan. Dalam bina lingkungan ini penulis mengambil indikator rumah singgah. Dalam upaya untuk memberdayakan anak jalanan agar bisa berdaya dan tidak kembali lagi kejalanan maka rumah singgah memiliki peran yang sangat penting.

Dari data yang diperoleh oleh peneliti maka dapat disimpulkan bahwa dalam indikator ini belum berjalan dengan baik hal ini ditandai Dinas Sosial tidak memiliki rumah singgah, masih ngontrak dan belum



memiliki fasilitas yang memadai hal ini dikarenakan minimnya anggaran yang dimiliki oleh Dinas Sosial Kota Serang.

#### **4. Bina Kelembagaan**

Dalam bina kelembagaan ini penulis mengambil indikator berupa sosialisasi. Sosialisai penting dilakukan dalam upaya untuk memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat agar kebijakan bisa berjalan dengan baik.

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh oleh peneliti dengan beberapa informan, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Serang sudah berjalan dengan baik. Namun kurangnya komitmen dari masyarakat untuk mematuhi peraturan agar tidak memberikan uang kepada anak jalanan, sehingga memicu terhambatnya implementasi kebijakan tidak berjalan dengan baik.

#### **3.3 Faktor Penghambat Dalam Implementasi Kebijakan Penanggulangan Anak Jalanan Dalam Rangka Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Yang Mandiri Di Kota Serang**

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan beberapa informan, peneliti dapat simpulkan bahwa, Dinas Sosial Kota Serang masih memiliki banyak faktor penghambat dari lingkup internal. Minimnya anggaran menjadi faktor utama terhambatnya proses implementasi kebijakan terkait penanganan anak jalanan di Kota Serang, ditambah ada 26 kategori Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

(PMKS) yang masing-masing kategori memiliki programnya masing-masing dan membutuhkan anggaran. Anggaran yang dimiliki sangat minim dan harus dibagi kepada kategori lainnya menyebabkan anggaran yang dimiliki untuk menangani anak jalanan semakin minim. Fasilitas yang dimiliki oleh Dinas Sosial Kota Serang juga sangat minim dan dapat menghambat proses penanganan anak jalanan. Kantor yang sempit dan masih mengontrak, rumah singgah yang masih mengontrak, ditambah sarana dan prasarana yang kurang memadai menjadi hambatan bagi Dinas Sosial Kota Serang untuk menangani anak jalanan di Kota Serang. Jumlah pegawai Dinas Sosial Kota Serang juga menjadi hambatan. 17 orang pegawai Dinas Sosial Kota Serang harus berhadapan dengan 26 kategori Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang masing-masing kategori memiliki jumlah yang tidak sedikit. Minimnya jumlah pegawai yang dimiliki dapat menghambat proses pelaksanaan kebijakan publik.

Faktor penghambat dari lingkup eksternal yang dialami Dinas Sosial Kota Serang dalam menangani anak jalanan yaitu anak jalanan itu sendiri. Mental dan kebiasaan mereka sangat sulit dirubah, walaupun pemerintah telah memberikan pembinaan, pelatihan, dan bantuan untuk melakukan usaha mereka tetap saja kembali menjadi anak jalanan. Bahkan bantuan peralatan yang diberikan seperti alat perbengkelan, steam motor, dan konter pulsa yang diberikan oleh Dinas Sosial Kota Serang dijual kembali. Hal ini dilakukan karena yang mereka butuhkan

adalah uang bukan peralatan. Hal ini ditambah dengan masih apatisnya masyarakat Kota Serang dengan masih memberi anak jalanan uang, padahal dalam Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat anak jalana termasuk kategori penyakit masyarakat yang perlu diberantas. Dengan masih diberikan uang oleh masyarakat kepada anak jalanan, mereka akan merasa nyaman karena masyarakat selalu memberikan mereka uang. Hal ini yang menyebabkan anak jalanan selalu kembali ke jalanan dari pada mengolah pemberian yang diberikan oleh pemerintah.

#### **3.4 Upaya Yang Dilakukan Untuk Mengatasi Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Penanggulangan Anak Jalanan Dalam Rangka Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Yang Mandiri Di Kota Serang**

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada narasumber dapat disimpulkan bahwa Dinas Sosial telah melakukan upaya-upaya untuk mengatasi faktor penghambat yang dialami dalam proses implementasi Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 tahun 2010 untuk menangani anak jalanan. Dinas Sosial Kota Serang telah mengajukan penambahan anggaran kepada Pemerintah Kota Serang. Pengajuan penambahan anggaran ini dilakukan karena anggaran yang dimiliki sangat minim, mengingat banyaknya permasalahan sosial yang harus ditangani oleh Dinas Sosial seperti 26 kategori Penyandang



Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang masing-masing kategori membutuhkan anggaran agar dapat merealisasikan program-programnya. Selain itu penambahan anggaran juga diperlukan untuk memperbaiki sarana dan prasarana yang kurang memadai. Seperti mendirikan panti sosial, panti rehabilitasi, dan memperbaiki fasilitas-fasilitas yang menunjang pekerjaan. Peningkatan komitmen bagi para pegawai Dinas Sosial dan pekerja sosial lainnya juga perlu dilakukan mengingat sulitnya anak jalanan untuk dibina agar kembali ke jalan yang benar. Selain itu para *stakeholders* juga perlu memiliki tekad yang kuat untuk menangani anak jalanan. Permasalahan anak jalanan merupakan kewajiban bagi pemerintah maupun masyarakat karena mereka juga warga negara yang memiliki hak yang sama dengan kita untuk mendapatkan kehidupan yang layak dan sejahtera. Pemerintah dan para pegawai Dinas Sosial harus memiliki jiwa sosial yang tinggi dan bekerja dengan ikhlas untuk membantu menangani anak jalanan mendapatkan kehidupan yang layak dan sejahtera.

### **3.5 Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Pada pelaksanaan penelitian dilapangan, peneliti menemukan bahwa pada masa pandemi covid-19 jumlah anak jalanan di Kota Serang semakin hari nya semakin bertambah pada setiap ruas-ruas jalan lampu merah di pusat Kota Serang. Ditemukan fakta juga bahwa anak jalanan yang tejarung oleh SATPOL-PP tidak sedikit dari mereka yang dari luar

Kota Serang. Pada hasil temuan peneliti tersebut bahwa implementasi kebijakan penanggulangan anak jalanan dalam rangka pemberdayaan sumber daya manusia yang mandiri di Kota Serang yang peneliti angkat sudah berjalan dengan baik hanya saja masih terdapat kendala atau hambatan pada anggaran yang terbatas, sumber daya fasilitas dan prasana yang kurang, dan anak jalanan itu sendiri.

Pada penelitian sebelumnya yang peneliti jadikan sebagai acuan dalam melakukan penelitian ini, Penelitian yang pertama yaitu, Studi Anak Jalanan (tinjauan peraturan daerah nomor 2 tahun 2008 tentang pembinaan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis di Kota Makassar). (Sakman, 2016). Ditemukan bahwa Implementasi perda dalam pembinaan anak jalanan belum berjalan secara optimal.

Berikutnya Analisis kebijakan pendidikan untuk anak jalanan di Kota Yogyakarta (Syahrul dan Amika Wardana, 2017) ditemukan hasil bahwa layanan pendidikan formal dan informal khusus anak jalanan sudah tidak relevan dengan kondisi kehidupan saat ini.

Peran keluarga dalam pembinaan anak jalanan di jalan Sultan Alauddin Makassar (Nurhadi Shadiqqin, 2018) ditemukan hasil bahwa Peran keluarga dalam pembinaan pendidikan anak jalanan di kawasan jalan Sultan Alauddin tidak berjalan dengan baik.

Dari temuan-temuan hasil penelitian peneliti dengan penelitian sebelumnya dapat dijadikan sebuah diskusi penelitian dalam mengatasi

permasalahan anak jalanan sehingga menemukan solusi yang terbaik untuk penelitian berikutnya.

#### **IV. KESIMPULAN**

##### **4.1 Implementasi Kebijakan Penanggulangan Anak Jalanan Dalam Rangka Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Yang Mandiri**

Analisis yang penulis lakukan menggunakan indikator teori implementasi milik George Edward III dalam buku Wirman Syafri (2010:46), dan teori pemberdayaan oleh Mardikanto Soebianto yang dapat menentukan keberhasilan proses implementasi Kebijakan Penanggulangan Anak Jalanan Dalam Rangka Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Yang Mandiri Di Kota Serang.

Berdasarkan hasil wawancara, obserervasi, dan dokumentasi yang telah dilakukan oleh penulis lakukan di Dinas Sosial Kota Serang dalam rangka mengetahui proses implementasi kebijakan penanggulangan anak jalanan di Kota Serang dalam rangka pemberdayaan sumber daya manusia yang mandiri di Kota Serang maka diperoleh kesimpulan bahwa dari 8 (delapan) dimensi yang terdiri dari 17 (tujuh belas) indikator pada Implementasi kebijakan penanggulangan anak jalanan di Dinas Sosial Kota Serang masih ditemukan kendala, sehingga tidak berjalan secara optimal dan harus ditingkatkan lagi. Adapun kendala yang penulis temukan terdapat pada teori Edward III yaitu dimensi Sumber Daya dan dimensi Disposisi.



Kendala ditemukan pada indikator staf dan indikator fasilitas pada Dimensi Sumber Daya. Pada Dimensi Disposisi penulis menemukan kendala pada indikator Insentif. Berikutnya pada teori Mardikanto ditemukan kendala pada Dimensi Bina Usaha, Dimensi Bina Lingkungan dan Bina Kelembagaan. Kendala ditemukan pada indikator Pelatihan dan indikator Modal pada Dimensi Bina Usaha. Pada Dimensi Lingkungan penulis menemukan kendala pada indikator Rumah Singgah. Pada Dimensi Kelembagaan Penulis menemukan kendala pada indikator Sosialisasi.

#### **4.2 Faktor Penghambat**

1. Minimnya jumlah anggaran yang dimiliki Dinas Sosial Kota Serang untuk menangani 26 kategori Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) termasuk anak jalanan di dalamnya di Kota Serang.
2. Kurangnya kuantitas pegawai yang dimiliki Dinas Sosial Kota Serang untuk menangani permasalahan sosial yang kompleks di Kota Serang.
3. Minimnya fasilitas yang dimiliki Dinas Sosial Kota Serang untuk menangani anak jalanan di Kota Serang.
4. Sulitnya merubah mental dan perilaku anak jalanan melalui pembinaan, pelatihan, dan bantuan yang diberikan agar tidak kembali turun kejalanan untuk menjadi anak jalanan.

5. Masih kurangnya peran dari masyarakat untuk turut mensukseskan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2010 karena masih memberikan uang kepada anak jalanan yang menyebabkan anak jalanan betah pergi ke jalanan.

#### **4.3 Upaya Dinas Sosial Kota Serang Dalam Mengatasi Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Penanggulangan Anak Jalanan**

1. Dinas Sosial Kota Serang telah melakukan pengajuan penambahan anggaran kepada Pemerintahan Kota Serang karena banyaknya anggaran yang harus dikeluarkan untuk menangani 26 Kategori Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) termasuk anak jalanan di Kota Serang.
2. Menambah sarana dan prasarana untuk menunjang kinerja Dinas Sosial Kota Serang dalam menangani anak jalanan di Kota Serang.
3. Meningkatkan komitmen para pegawai Dinas Sosial Kota Serang, Pekerja Sosial, dan *stakeholders* lainnya untuk menuntaskan permasalahan anak jalanan di Kota Serang mengingat masih banyaknya jumlah anak jalanan dan sulitnya membina mental anak jalanan agar tidak kembali ke jalanan.

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian yang hanya dilakukan selama 2 minggu sehingga belum terlalu banyak informasi yang telah di dapatkan.

**Arah Masa Depan penelitian.** peneliti menyadari penelitian ini baru dilakukan di Kota Serang oleh karena itu peneliti menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa yang berkaitan dengan Penanggulangan Anak Jalanan di Kota Serang yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Serang.

#### **V. UCAPAN TERIMA KASIH**

1. Bapak Dr. Andi Pitono, M.Si., selaku Dekan Fakultas Politik Pemerintahan.
2. Bapak Anwar Rosshad, SH, M.Si., selaku Ketua Prodi Studi Kebijakan Publik.
3. Bpk. Dr. H. Mansyur Achmad, M.Si., selaku Dosen Pembimbing I, yang telah banyak memberikan sumbangan pemikiran, arahan dan bimbingan kepada penulis
4. Ibu. Dra. Swani Sona Saragih, M.Si., selaku Dosen Pembimbing II, yang telah banyak memberikan petunjuk dan perhatian serta bimbingan kepada penulis



## V.I DAFTAR PUSTAKA

### SUMBER BUKU

- Bajari, Atwar. 2012. *Anak Jalanan: Dinamika Komunikasi dan Perilaku Sosial Anak Menyimpang*. Bandung: Humaniora.
- BKSN (Badan Kesejahteraan Sosial Nasional). 2000. *Anak Jalanan di Indonesia: Permasalahan dan Penanganannya*. Jakarta: Badan Kesejahteraan Sosial Nasional.
- Bungin, Burhan. 2014. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Kencana Prenada Media.
- Given, Lisa M. 2008. *The Sage Encyclopedia of Qualitative Research Methods Volumes 1&2*. California: Sage Publications, Inc.
- Mardikanto dan Soebianto. 2017. *Pemberdayaan masyarakat*. Bandung: Alfabeta
- Nazir, Moh. 2014. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Neuman, W. Laurence. 2004. *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*. USA : Allyn & Bacon.
- Purwanto, Erwan Agus dan Dyah Ratih Sulistyastuti. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media.
- Sholeh, Chabib. 2014. *Dialektika pembangunan dengan pemberdayaan*. Bandung: Fokusmedia
- Subarsono, A.G. 2011. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Surbakti. 1997. *Prosiding Lokakarya Persiapan Survei Anak Rawan, Studi Rintisan di Kotamadya Bandung*. Jakarta: BPS dan UNICEF.
- Syafri,Wirman. 2010. *Implementasi Kebijakan Publik dan Etika Profesi Pamong Praja*. Sumedang: Alqaprint Jatinangor.
- Usman, Husaini. 2008. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Wahab, Solichin Abdul. 2015. *Analisis Kebijakan*. Jakarta: Bumi Aksara.

### ARTIKEL/JURNAL/SKRIPSI

- Budi Hasanah dan Liza Diniarizky Putri, 2019. *Penanganan Anak Jalanan Berbasis Community Development di Kota Serang*. Jurnal Natapraja Kajian Ilmu Administrasi Negara, Vol. 7, No. 2, Desember 2019
- Nurhadi Shadiqin, 2018. *Peran keluarga Dalam Pembinaan Anak Jalanan di Jalan Sultan Alauddin Makassar*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar: Makassar

- Sakman, 2016. *Studi Anak Jalanan ( Tinjauan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis dan Pengamen di Kota Makassar)*. Jurnal Supremasi, Vol. 9, No. 2, Oktober 2016
- Suryadi, dkk .2020. *Fenomena Anak Jalanan Di Kota Cirebon*. Jurnal Equalita, Vol. 2 No. 1, Juni 2020.
- Syahrul dan Amika Wardana, 2017. *Analisis Kebijakan Pendidikan Untuk Anak Jalanan di Kota Yogyakarta*. Jurnal Harmoni Sosial: Pendidikan IPS, Vol. 4, No. 2, September 2017

## **UNDANG-UNDANG**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik IndoneSsia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial.
- Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat.
- Peraturan Walikota Serang Nomor 41 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat.
- Peraturan Walikota Serang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial.